

## **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Surplus/Defisit Anggaran, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pinjaman Daerah di Provinsi Sumatera Selatan**

**Hilda Salsabila<sup>1</sup>, Kartika Rachma Sari<sup>2</sup>, Henny Yulsiati<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*hildasalsabila60@gmail.com<sup>1</sup>, kartikasyahrul@polsri.ac.id<sup>2</sup>,*

*henny.yulsiati@polsri.ac.id<sup>3</sup>*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to evaluate the results of the analysis of the influence of local revenue, budget surplus/deficit and general allocation funds on regional loans in South Sumatra Province. The sampling method in this study is using saturated sampling. This study uses secondary data as information. This study uses panel data regression assisted by the Econometric views (Eviews) version 12 program. The results of this study show the results of the t-test that the surplus/deficit has a negative and significant effect on regional loans, general allocation funds have a positive and significant effect on regional loans. The results of the F test show that local revenue, budget surplus/deficit, and general allocation funds have a joint and significant effect on regional loans.*

**Keywords:** *Regional Loans, Regional Original Income, Budget Surplus/Deficit, General Allocation Funds.*

### **ABSTRAK**

Tujuan dari kajian ini agar dapat melakukan evaluasi terhadap hasil analisis pengaruh pendapatan asli daerah, surplus/defisit anggaran serta dana alokasi umum terhadap pinjaman daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Metode pengambilan sampel pada kajian ini ialah menerapkan sampling jenuh. Kajian ini memakai data sekunder sebagai informasi. Kajian ini ini memakai regresi data panel yang dibantu oleh program Econometric views (Eviews) versi 12. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil uji t bahwa surplus/defisit memengaruhi secara negatif serta signifikan terhadap pinjaman daerah, dana alokasi umum memengaruhi secara positif serta signifikan terhadap pinjaman daerah. Hasil uji F memperlihatkan bahwasanya pendapatan asli daerah, surplus/defisit anggaran, serta dana alokasi umum memengaruhi dengan cara bersamaan dan signifikan terhadap pinjaman daerah.

**Kata Kunci:** Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Surplus/ Defisit Anggaran, Dana Alokasi Umum.

### **PENDAHULUAN**

Merujuk UU RI No. 1 Tahun 2022 perihal Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia sudah melimpahkan hak pengelolaan kepada pemerintah daerah agar dapat melakukan pengelolaan terhadap masing-masing hak serta kewajiban

keuangan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah masing-masing yang memiliki cara sendiri untuk mengelola sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya. Rendahnya kemampuan keuangan daerah menjadi masalah dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber pendapatan yang nanti akan dapat mempengaruhi terhadap pengurangan kebutuhan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan daerahnya tidaklah cukup dari penerimaan atas pendapatan asli daerah (PAD) namun diperlukan sumber dana perimbangan dari pemerintah pusat

Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi yang signifikan namun terdapatnya tantangan terhadap pengelolaan kemampuan keuangan daerah, seperti ketidakseimbangan antara sumber pendapatan dan belanja menyebabkan terjadinya defisit dalam APBD. Berdasarkan LKPD di Provinsi Sumatera Selatan, bahwa pada tahun 2021 kab/kota sebanyak 5 (lima) kab/kota mengalami defisit anggaran, pada tahun 2022 mengalami defisit anggaran yang sebanyak 5 (lima) kab/kota yang mengalami defisit anggaran, namun pada tahun 2023 defisit anggaran pada kab/kota di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sebanyak 10 (sepuluh) kab/kota yang mengalami defisit anggaran. Sehingga dengan adanya laporan keuangan pada kabupaten serta kota di pemerintah provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwasanya pengelolaan keuangan yang masih rendah sehingga dengan upaya untuk menutupi defisit anggaran tersebut diperlukannya pinjaman daerah sebagai solusi untuk menutupi kekurangan anggaran dikarenakan defisit.

Namun terdapatnya fenomena pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan adanya surplus anggaran namun memiliki pinjaman daerah yang signifikan masih terbilang besar yang dilihat dari tahun sebelumnya, seperti pada Kabupaten Empat Lawang pada Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa pada tahun tersebut Kabupaten Empat Lawang mendapatkan Surplus sebesar Rp109.692.754.809,00 namun tingkat pinjaman daerah di kabupaten tersebut masih terlalu tinggi sebesar Rp 314.805.104.476,00, Sehingga meskipun surplus pada laporan keuangan yang berarti menunjukkan bahwa suatu daerah dapat mampu mengelola keuangannya dengan baik namun adanya beberapa faktor sehingga pemerintah daerah tetap melakukan pinjaman daerah seperti kebutuhan untuk mendanai proyek besar, dan pinjaman yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mendukung pembangunan daerah. Dari fenomena tersebut peneliti untuk mengambil variabel Surplus/Defisit Anggaran yang merujuk pada penelitian Mulyono (2007) dan Izzah (2012) menyatakan bahwasanya variabel Surplus/Defisit Anggaran memengaruhi Pinjaman Daerah, berbanding terbalik dengan penelitian Ilmiddaviq (2018) menyatakan bahwa Surplus/Defisit Anggaran tidak memengaruhi Pinjaman Daerah.

Tabel berikut menunjukkan persentase realisasi penerimaan pendapatan untuk provinsi Sumatera Selatan:

**Tabel 1. Rata-rata persentase realisasi penerimaan pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan 2021-2023**

	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	77,82%	88,42%	98,49%	92,71%
Dana Perimbangan	93,60%	98,65%	104,80%	90,95%
Pinjaman Daerah	102,70%	164,52%	56,21%	105,45%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	126,58%	77,71%	40,62%	109,68%

Sumber: DJPK yang diolah, 2025

Dari tabel 1 Ada kecenderungan bahwasanya penerimaan pendapatan yang diterima oleh Provinsi Sumatera Selatan akan meningkat pada tahun 2021 pada PAD mengalami peningkatan sebesar 88,42% namun tingkat pinjaman yang meningkat sebesar 164,52%. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan daerah masih belum optimal dapat mempengaruhi kapasitas fiskal. Hal ini juga dijelaskan pada buku “Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia” yang ditulis oleh tim Badan Kebijakan Fiskal (2021) menjelaskan “Kapasitas fiskal daerah dapat dijadikan indikator bagi suatu daerah apabila akan mengadakan suatu pinjaman terkait dengan kemampuan daerah itu untuk membayar kembali pinjamannya”. Hasil penelitian Mulyono (2007) dan Izzah (2012) memperlihatkan bahwasanya variabel PAD memengaruhi secara positif serta signifikan pada pinjaman daerah, sedangkan menurut penelitian dari Ilmiddaviq (2018) dan Yulsiati & Maqruf (2022) bahwasanya variabel PAD tidak memengaruhi serta tidak signifikan terhadap Pinjaman Daerah.

Adanya fenomena Dana perimbangan yang masih mendapatkan peningkatan dan penurunan dalam pengelolaan keuangannya sehingga pemerintah pusat memberikan kewenangannya kepada pemerintahan daerah untuk memanfaatkan dana transfer seperti DAU dalam memenuhi kebutuhan daerahnya jika dana dari pemerintahan pusat yaitu DAU tidak mencukupi kebutuhan daerah, dengan adanya pemberian kewenangan pada pemerintah daerah maka pemerintah daerah dapat memakai pinjaman daerah sebagai alternatif untuk membiayai proyek daerah. Variabel DAU memengaruhi secara positif terhadap Pinjaman Daerah dari penelitian Izzah (2012). Berbanding terbalik dengan penelitian Yulsiati & Maqruf (2022) menjelaskan bahwa DAU tidak memengaruhi secara positif terhadap Pinjaman Daerah.

Menurut Peraturan PP No. 56 Tahun 2018 mengenai Pinjaman Daerah menjelaskan bahwasanya pinjaman daerah diperlukan bagi pemerintahan daerah sebagai penambahan yang dapat memberikan manfaat dalam pembiayaan infrastruktur, investasi prasarana bahkan sarana daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini didukung oleh Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan. Menyampaikan informasi mengenai pinjaman daerah, yaitu: “Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2021 sebesar Rp 493.566.176.762,71 merupakan pinjaman Program

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur untuk mengurangi dampak Covid-19 yang berdampak pada ekonomi. Rincian program/kegiatan uang didanai dari utang PT Sarana Multi Infrastruktur yang terdapat pada Lampiran 38 yang berisikan Rehabilitasi jalan, dan Pemeliharaan berkala jalan.”

Berdasarkan permasalahan yang ada di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, masih belum mengoptimalkan pendapatan daerah yang diterima sehingga dalam mengoptimalkan kemampuan keuangan diperlukannya pinjaman daerah untuk menutupi kekurangan kas dan untuk membiayai kebutuhan daerah seperti dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan.

Kajian ini bertujuan agar mendapatkan bukti empiris dengan cara parsial serta simultan bahwasanya PAD, surplus/defisit anggaran maupun dana alokasi umum memengaruhi pinjaman daerah di provinsi Sumatera Selatan.

## **Teori Desentralisasi Fiskal**

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia diawali dengan pengesahan resmi UU No. 22 Tahun 1999 perihal Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 tahun 1999 terkait Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejak saat itu UU No.25 Tahun 1999 sudah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana tercantum UU No. 1 Tahun 2022 perihal Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2022

Pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat menjadi tugas yang pemerintah berikan berlandaskan asas desentralisasi sehingga pelaksanaan dalam pengelolaan pendapatan juga menjadi kewenangan dalam melakukan pemungutan PAD yang berupa pajak atau retribusi serta pengelolaan atas penerimaan transfer keuangan berupa dana perimbangan menjadi kewenangan yang dilimpahkan ke daerah.

Dengan penyelenggaraan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah agar mampu melakukan pengelolaan keuangan lebih mandiri dalam mencari sumber pendanaan alternatif dengan tujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin. Pemerintah diharapkan dapat melakukan seefektif mungkin, mengingat bahwa pemerintah daerah dalam menemukan alternatif pendanaan untuk memperluas kapasitas keuangan daerah, sehingga pinjaman daerah dipandang sebagai alternatif yang positif yang mampu menunjang pemerintah daerah dalam menangani permasalahan anggaran, serta ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

## **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pinjaman Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) dipahami sebagai seluruh perolehan yang bersumber dari hak daerah kekuasaannya sendiri dan dapat menambah nilai kekayaan bersih suatu wilayah yang bertujuan memberikan peningkatan terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah. Indikator ini menggunakan Ketersediaan sumber daya yang besar dan PAD yang tinggi mencerminkan kenaikan kemampuan ekonomi dan fiskal sebuah daerah sehingga makin besar pula

kemungkinan atau kemampuan yang diperoleh oleh suatu daerah dalam melakukan pengambilan pinjaman karena terdapatnya tersedianya dana yang cukup untuk melakukan pembayaran hutang. Hal ini merujuk pada teori desentralisasi fiskal yang menguraikan penyerahan otoritas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan agar daerah mampu mengatur dan mengelola sumber daya fiskalnya sendiri untuk melakukan keputusan mendapatkan pinjaman sebagai alternatif pendanaan.

Temuan empiris yang dikemukakan oleh Mulyono (2007) dan Izzah (2012) menunjukkan terdapat relasi positif antara PAD dengan Pinjaman Daerah. Berdasarkan temuan tersebut, penulis merumuskan hipotesis mengenai pengaruh PAD terhadap Pinjaman Daerah.

**H<sub>1</sub>: Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah Pada Pinjaman Daerah di Provinsi Sumatera Selatan**

### **Pengaruh Surplus/Defisit Anggaran Terhadap Pinjaman Daerah**

Surplus/Defisit Anggaran merupakan selisih lebih dan kurang dari anggaran pendapatan belanja daerah yang berfungsi sebagai pengukur manajemen keuangan daerah. Surplus anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa ketersediaan dana yang cukup atau kecil sehingga pemerintah daerah mengambil pinjaman untuk membiayai proyek-proyek strategis. Adanya defisit anggaran yang menjadi indikator dalam mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan utang pemerintah, sehingga makin tingginya tingkat defisit anggaran maka makin tingginya suatu pemerintah daerah dalam menggunakan utang.

Temuan empiris yang dikemukakan oleh Mulyono (2007) dan Kurrohman (2009) menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif Surplus/Defisit Anggaran terhadap Pinjaman Daerah. Berdasarkan temuan tersebut, penulis merumuskan hipotesis mengenai pengaruh surplus/defisit anggaran pada pinjaman daerah.

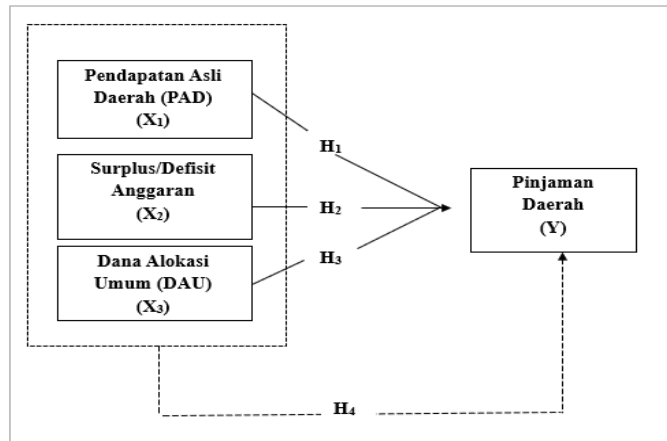
**H<sub>2</sub>: Pengaruh antara Surplus/Defisit Pada Pinjaman Daerah di Provinsi Sumatera Selatan**

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pinjaman Daerah**

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara agar dapat meningkatkan pemerataan pada daerah yang memiliki tujuan agar dapat mengurangi ketimpangan antar daerah melalui dana sebagai sumber kebutuhan daerah. Makin besar Dana Alokasi Umum yang diperoleh suatu daerah mampu memberikan dampak terhadap mendorong pemerintah dalam ketergantungan finansial pada pemerintah pusat sehingga akan menimbulkan kemalasan dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan peningkatan pada defisit anggaran sehingga akan mendorong daerah tersebut untuk mengambil pinjaman.

Bukti empiris ini ditemukan oleh Mulyono (2007), Kurrohman dan Izzah (2012) menjelaskan bahwasanya Dana Alokasi Umum memengaruhi Pinjaman Daerah. Menurut temuan tersebut, penulis merumuskan hipotesis mengenai pengaruh DAU terhadap pinjaman daerah.

### H<sub>3</sub>: Pengaruh antara Dana Alokasi Umum Pada Pinjaman Daerah di Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 1. Kerangka Pemikir

#### METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada kajian ini ialah pendekatan kuantitatif. dan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi. Kajian ini berfokus pada Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 17 Kabupaten dan Kota dengan periode 2021-2023. Pada kajian ini ada dua jenis variabel, yakni variabel independen yang berfungsi sebagai faktor yang memengaruhi, serta variabel dependen yang merupakan akibat dari variabel independen Sugiyono (2022:39). Data yang dipakai pada kajian ini ialah Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dengan memakai teknik pengumpulan data dokumentasi yang bersumber dari BPK dari situs resmi [ppid.bpk.go.id](http://ppid.bpk.go.id), di bantu alat program *Econometric Views* (Eviews) versi 12. Teknik yang diimplementasikan untuk mengambil sampel ialah sampling jenuh, yang berarti seluruh elemen dalam populasi dijadikan sampel penelitian Sugiyono(2022:81). Dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan semua 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tabel 2:

Tabel 2. Kriteria Penentuan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1	Pemerintah daerah yang melakukan pinjaman daerah dan tercatat dalam Laporan Realisasi APBD dan Neraca Tahun 2021-2023	17
2	Tahun Penelitian	3
<b>Total</b>		<b>51</b>

Sumber: Data Sekunder yang diolah,2025

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Statistik Deskriptif

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Volume 7 Nomor 10 (2025) 3274 - 3288 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i10.8979

Berikut menyajikan gambaran atas setiap variabel independen serta variabel dependen yang menampilkan nilai rata-rata, simpangan baku, minimal, maksimal.

**Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif**

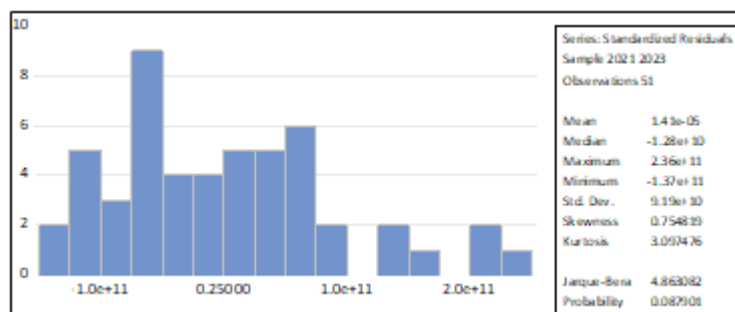
	Y (Pinjaman Daerah)	X <sub>1</sub> (PAD)	X <sub>2</sub> (Surplus/ Defisit Anggaran)	X <sub>3</sub> (DAU)
Mean	124.600.647.827	255.554.792.183	89.939.186.885,5	634.157.227.021
Median	103.890.554.551	128.297.636.758	10.651.852.436	585.241.424.000
Maximum	414.497.444.935	144.261.063.434	38.078.079.628	2.222.038.745.210
Minimum	7.894.398.690.09	27.846.959.236	-325.765.896.277	287.319.337.731
Std. Dev	107.369.860.703	353.145.151.369	548.668.476.935	335.530.126.615

Sumber: *Output* data diolah (Eviews 12), 2025

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Berikut menggambarkan *output* uji normalitas



**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas**

Sumber: *Output* data diolah (Eviews 12), 2025

Dari hasil uji normalitas memperlihatkan nilai *Jarque-Bera* bernilai 4.863082 serta Nilai *probability* bernilai 0.087901. Nilai *probability* lebih besar dari  $\alpha$  ( $0.087901 > 0.05$ ), sehingga  $H_0$  diterima, yang berarti hasil uji normalitas data pada kajian ini dianggap berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Berikut tabel 4 menyajikan hasil pemeriksaan

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

	X <sub>1</sub> (PAD)	X <sub>2</sub> (Surplus/Defisit Anggaran)	X <sub>3</sub> (DAU)	Keterangan
X <sub>1</sub>	1.000000	0.032526	0.382247	Tidak Terjadi Gejala <u>Multikolinearitas</u>
X <sub>2</sub>	0.032526	1.000000	0.666260	Tidak Terjadi Gejala <u>Multikolinearitas</u>
X <sub>3</sub>	0.382247	0.666260	1.000000	Tidak Terjadi Gejala <u>Multikolinearitas</u>

Sumber: *Output data diolah (Eviews 12), 2025*

## Uji Heteroskedastisitas

Berikut tabel 5 menyajikan hasil pemeriksaan agar dapat melakukan pengujian terhadap heteroskedastisitas, kajian ini menerapkan metode Glejser, dalam kajian ini tidak terjadinya heteroskedastisitas

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.588825	Prob. F(3,47)	0.2046
Obs*R-squared	4.695900	Prob. Chi-Square(3)	0.1955
Scaled explained SS	4.361196	Prob. Chi-Square(3)	0.2250

Sumber: *Output data diolah (Eviews 12), 2025*

## Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel 6 menyajikan, hasil uji autokorelasi mengindikasikan bahwa data tidak mengalami autokorelasi

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi**

Mean dependent var	4.27E+09
S.D. dependent var	1.02E+11
Sum squared resid	3.19E+23
Durbin-Watson stat	2.274545

Sumber: *Output data diolah (Eviews 12), 2025*

## Pemilihan Model Data Panel

### Uji Chow

Merujuk hasil uji Chow yang disajikan dalam Tabel 7, model Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model terbaik.

**Tabel 7. Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.459343	(16,31)	0.0155
Cross-section Chi-square	41.793906	16	0.0004

Sumber: *Output data diolah (Eviews 12), 2025*

### Uji Hausman

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Volume 7 Nomor 10 (2025) 3274 - 3288 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i10.8979

Meruju hasil uji Hausman dalam Tabel 8, model yang paling sesuai ialah Random Effect Model (REM).

**Tabel 8. Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. df.	Prob.
Cross-section random	4.232007	3	0.2375

Sumber: *Output data diolah (Eviews 12), 2025*

### Uji Lagrange Multiplier

Perbedaan hasil dari uji Chow dengan uji Hausman mengharuskan maka diselenggarakannya uji berikutnya uji Lagrange Multiplier (LM) selaku penentu model data panel paling baik. Berdasarkan tabel 9, hasil uji LM, memperlihatkan bahwasanya model Random Effect Model (REM) ialah yang paling sesuai untuk kajian ini.

**Tabel 9. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)**

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	3.774295 (0.0520)	0.817196 (0.3660)	4.591491 (0.0321)

Sumber: *Output data diolah (Eviews 12), 2025*

### Analisis Regresi Data Panel

**Tabel 10. Hasil Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.46E+09	4.33E+10	0.079923	0.9366
X1	-0.013118	0.046140	-0.284316	0.7774
X2	-0.123357	0.037894	-3.255324	0.0021
X3	0.213802	0.073646	2.903126	0.0056

Sumber: *Output data diolah (Eviews 12), 2025*

Dengan hasil tersebut, persamaan regresi data panel dirumuskan seperti berikut:

$$Y = 3.463517 - 0.013118X_1 - 0.123357X_2 + 0.213802X_3 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 3.463517 menjelaskan bahwa variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Surplus/Defisit Anggaran ( $X_2$ ) dan Dana Alokasi Umum ( $X_3$ ) bernilai 0, maka nilai variabel dependen yaitu Pinjaman Daerah adalah 3.463517.
2. Nilai koefisien regresi pada variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) memiliki nilai negatif -0.013118 maka dapat diartikan bahwasanya setiap peningkatan

pada Pendapatan Asli Daerah 1,00 dapat menyebabkan penurunan pinjaman daerah bernilai -0.013118, dengan asumsi variabel independen yang lain tetap konstan.

3. Nilai koefisien regresi pada variabel Surplus/Defisit Anggaran ( $X_2$ ) bernilai negatif bernilai -0.123357 maka dapat diartikan bahwasanya setiap peningkatan pada Surplus/Defisit Anggaran bernilai 1,00 akan mengakibatkan penurunan pinjaman daerah bernilai -0.123357, dengan asumsi variabel independen yang lain tetap konstan.
4. Nilai koefisien regresi pada variabel Dana Alokasi Umum ( $X_3$ ) memiliki nilai positif bernilai 0.213802 maka dapat diartikan bahwasanya setiap penambahan pada Dana Alokasi Umum bernilai 1,00 sehingga Pinjaman Daerah dapat mengalami peningkatan bernilai 0.213802, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berikut tabel 11 menyajikan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

R-squared	0.202830
Adjusted R-squared	0.151947
S.E. of regression	7.80E+10

Sumber: *Output data diolah (Eviews 12), 2025*

Merujuk tabel 11 hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), bahwasanya semua nilai koefisien determinasi telah diketahui sebagai berikut:

1. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) ialah bernilai 0.202830. Nilai koefisien determinasi dipakai agar dapat melakukan pengukuran terhadap taraf kecocokan antara variabel independen serta variabel dependen.
2. Nilai Adjusted R-Squared yang telah disesuaikan bernilai 0.151947 maka artinya bahwasanya nilai  $R^2$  yang sudah disesuaikan dengan Jumlah variabel independen serta ukuran sampel berperan penting dalam memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan model dalam menjabarkan variasi data. Variabel-variabel independen yang digunakan pada penelitian ini mampu menguraikan sekitar 15,19% variasi pada variabel dependen, sementara sisa lainnya sebanyak 84,81% dijabarkan oleh beberapa faktor yang tidak terdapat dalam model
3. Nilai S.E of Regression bernilai 77997104749.0203 yang memprediksi nilai sebenarnya, jika nilai rata-rata pinjaman daerah bernilai Rp124.600.647.827,73 maka nilai kesalahan prediksi itu sebesar 62,60% yang artinya menunjukkan kesalahan prediksi model yang akan terjadi terhadap memprediksi pinjaman daerah, sehingga menunjukkan bahwa model kurang akurat yang disebabkan karena data nilai uang dalam jumlah yang besar.

## Uji Hipotesis

### Uji Parsial (Uji t)

Berikut tabel 12 menyajikan hasil uji t

**Tabel 12. Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.46E+09	4.33E+10	0.079923	0.9366
X1	-0.013118	0.046140	-0.284316	0.7774
X2	-0.123357	0.037894	-3.255324	0.0021
X3	0.213802	0.073646	2.903126	0.0056

Sumber: *Output data diolah (Eviews 12), 2025*

Hasil t tabel dapat diperoleh sebesar 2.01174. Maka hasil pengujian parsial pada tabel berikut:

1. Hasil analisis menggunakan Eviews 12 memperlihatkan bahwasanya variabel bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) bernilai t hitung  $-0.284316 > -2.01174$  serta nilai signifikan yang diperoleh ( $0.7774 > 0.05$ ), sehingga menunjukkan adanya tidak adanya hubungan signifikan. Dengan demikian  $H_1$  ditolak yang berarti variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) tidak memengaruhi serta signifikan terhadap Pinjaman Daerah (Y).
2. Hasil analisis menggunakan Eviews 12 menunjukkan bahwa variabel Surplus/Defisit Anggaran ( $X_2$ ) memiliki nilai t hitung  $-3.255324 < -2.01174$  serta nilai signifikan yang diperoleh ( $0.0021 < 0.05$ ), sehingga menunjukkan adanya hubungan signifikan. Dengan demikian  $H_2$  diterima yang berarti variabel Surplus/Defisit Anggaran ( $X_2$ ) memengaruhi secara negatif serta signifikan terhadap Pinjaman Daerah (Y).
3. Hasil analisis menggunakan Eviews 12 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum ( $X_3$ ) bernilai t hitung  $2.903126 > 2.01174$  serta nilai signifikan yang diperoleh ( $0.0056 < 0.005$ ), sehingga menunjukkan adanya hubungan signifikan. Dengan demikian  $H_3$  diterima yang berarti variabel Dana Alokasi Umum ( $X_3$ ) memengaruhi secara positif serta signifikan terhadap Pinjaman Daerah (Y).

### Uji Simultan (Uji F)

Berikut tabel 13 menyajikan hasil uji f

**Tabel 13. Hasil Uji F**

R-squared	0.202830
Adjusted R-squared	0.151947
S.E. of regression	7.80E+10
F-statistic	3.986184
Prob(F-statistic)	0.013070

Sumber: *Output* data diolah (Eviews 12), 2025

Dari tabel tersebut bahwa F hitung  $3.986184 > F$  tabel  $3.20$  serta nilai signifikan  $0.013070 < 0.05$ , dikarenakannya ditarik kesimpulan bahwasanya  $H_4$  diterima artinya Pendapatan Asli Daerah, Surplus/Defisit Anggaran, serta DAU dengan cara simultan memengaruhi serta signifikan terhadap Pinjaman Daerah.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pinjaman Daerah**

Hasil hipotesis secara parsial memperlihatkan bahwasanya setiap peningkatan pada PAD di Provinsi Sumatera Selatan tidak mempengaruhi Pinjaman Daerah. Merujuk PP No. 12 Tahun 2019 perihal Pengelolaan Keuangan Daerah, PAD mencakup pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, maupun sebagainya PAD yang sah. Baldrice Siregar (2017) PAD ialah pendapatan yang didapat pemerintah daerah dari berbagai sumber di daerahnya sendiri, yang pemungutannya dilakukan sejalan dengan peraturan daerah yang berlaku.

Tingginya PAD dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dari sumber pendapatan daerahnya dan dapat meminimalkan ketergantungan dengan penerimaan transfer dengan demikian, pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan tanpa harus mengambil pinjaman daerah, dengan kata lain meskipun PAD meningkat, hal ini secara tidak langsung menyebabkan pemerintah daerah mengurangi pinjaman.

Hasil penelitian ini mendukung temuan yang diperoleh Ilmiddaviq (2018), Yulsiati & Maqruf (2022) yang menyatakan bahwasanya PAD tidak mempengaruhi pinjaman daerah, sebab rata-rata PAD yang cukup tinggi, sehingga pemerintah daerah dapat mampu menutupi sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri tanpa melakukan pinjaman daerah.

### **Pengaruh Surplus/Defisit Anggaran**

Hasil hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Surplus/Defisit Anggaran memengaruhi secara negatif serta signifikan terhadap Pinjaman Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Halim & Kusufi (2014) Surplus merupakan selisih positif antara pendapatan dan pengeluaran selama periode pelaporan, sedangkan defisit ialah selisih negatif antara pendapatan serta pengeluaran pada periode yang sama tersebut. Surplus menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengalami kondisi yang cukup baik sehingga akan mencerminkan pengurangan dalam melakukan pinjaman daerah, namun daerah yang mengalami kondisi defisit akan memungkinkan kenaikan dalam penggunaan pinjaman daerah sebagai hal untuk menutupi akibat dari kekurangan kas.

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Volume 7 Nomor 10 (2025) 3274 - 3288 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i10.8979

Temuan kajian ini menunjang hasil yang diperoleh Mulyono (2007) dan Kurrohman (2009) yang menunjukkan adanya pengaruh surplus/defisit anggaran terhadap pinjaman daerah. Sehingga diartikan pemerintah daerah akan melakukan pinjaman daerah sebagai upaya dalam menutupi kebutuhan daerah karena kekurangan dana sebagai akibat tingginya tingkat defisit anggaran dengan mencari sumber pembiayaan lainnya yaitu berbentuk Pinjaman Daerah.

## **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pinjaman Daerah**

Hasil hipotesis dengan cara parsial menunjukkan bahwasanya DAU memengaruhi secara positif serta signifikan terhadap Pinjaman Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sadat. Anwar (2022) DAU ialah suatu dana yang didanai oleh daerah dari APBN dan dialokasikan ke APBD. Tujuannya adalah Upaya mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dilakukan melalui mekanisme perhitungan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi tiap daerah. DAU yang diterima dari dana transfer pusat memberikan keterbatasan bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga menyebabkan pemerintah mencari sumber pendanaan untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur hal ini juga dijelaskan dalam PP RI No. 56 Tahun 2018 mengenai Pinjaman Daerah

Temuan kajian ini menunjang temuan yang diperoleh oleh Mulyono (2007), Kurrohman (2009), Izzah (2012), dan Ilmiddaviq (2018) yang memperlihatkan terdapat pengaruh DAU terhadap pinjaman daerah. Sehingga diartikan makin tingginya DAU yang diterima oleh sebuah daerah dari pemerintah pusat maka mampu menimbulkan kemalasan pada pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan mendorong terjadinya defisit anggaran sehingga dapat mendorong suatu daerah untuk mengambil Pinjaman Daerah.

## **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Surplus/Defisit anggaran, Dana Alokasi Umum terhadap Pinjaman Daerah**

PAD menjadi sumber penerimaan daerah terhadap pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan, makin tingginya PAD dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan sebagai kapasitas fiskal daerah untuk mengambil pinjaman, surplus/defisit anggaran yang menggambarkan kondisi keseimbangan fiskal daerah yang dapat menjadikan sebagai indikator bagi pemerintah daerah yang kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan daerahnya yang memungkinkan bagi pihak pemerintah daerah untuk menambah pinjaman demi menutupi kekurangan dana ataupun untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat strategis, Dana Alokasi Umum menjadi bentuk transfer dari pemerintah pusat dimanfaatkan dalam membiayai kebutuhan daerah sehingga besarnya DAU dapat mempengaruhi tingkat pinjaman dan kemampuan dalam pembiayaan.

Sehingga dengan adanya variabel independen yakni PAD, Surplus/Defisit Anggaran, dan Dana Alokasi Umum dengan cara bersamaan dapat mempengaruhi keputusan pemerintah daerah untuk membuat pinjaman daerah yang ditentukan dari kondisi keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan kebijakan kapasitas fiskal, adanya pengaruh efisiensi anggaran dan pengelolaan keuangan dari dana transfer yang menjadi satu kesatuan yang terikat dalam menentukan kebutuhan suatu daerah untuk menggunakan pinjaman daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian, peneliti menarik kesimpulan antara lain:

1. Pendapatan asli daerah tidak memengaruhi pinjaman daerah. Sehingga diartikan besarnya PAD tidak memengaruhi kemunculan pinjaman daerah.
2. Surplus/defisit anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pinjaman daerah. Sehingga diartikan semakin tingginya tingkat surplus maka pemerintah cenderung mengurangi penggunaan pinjaman, namun upaya pemerintah dalam mengatasi tingginya defisit anggaran sehingga dapat memicu semakin meningkatnya penggunaan pinjaman daerah
3. Dana alokasi umum memengaruhi secara positif serta signifikan terhadap pinjaman daerah. Sehingga diartikan tingginya dana alokasi umum dapat mendorong sebuah daerah untuk melakukan pinjaman daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah, Surplus/Defisit Anggaran, serta Dana Alokasi Umum secara simultan memengaruhi secara positif serta signifikan terhadap Pinjaman Daerah. Perihal tersebut menunjukkan saat Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, Surplus/Defisit Anggaran meningkat, serta Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan, maka dapat meningkatkan terhadap Pinjaman Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan pada kajian ini, peneliti menyediakan sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah, terdapat harapan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber penerimaan daerah dari berbagai sumber daya khususnya pinjaman daerah, sehingga mengurangi ketergantungan daerah kepada penerimaan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dan mampu memberikan peningkatan terhadap kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri
2. Bagi peneliti selanjutnya, terdapat harapan agar dapat menyelenggarakan penelitian dengan menambahkan variabel lainnya yang berpotensi memengaruhi pinjaman daerah, disarankan untuk menambah periode waktu yang lebih panjang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Baldric Siregar. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. UPP STIM YKPN.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4 ed.). Penerbit Salemba Empat.

Ilmiddaviq, M. B. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pinjaman Daerah Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 134–147. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Volume 7 Nomor 10 (2025) 3274 – 3288 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i10.8979

- Izzah, N. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pinjaman Daerah Di Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009)*.
- Kurrohman, T. (2009). Determinan Pinjaman Kebijakan Daerah Studi Kasus di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Mulyono, I. (2007). Aspek-Aspek Kuantitatif Yang Mempengaruhi Kebijakan Pinjaman Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Timur). *Jurnal Tera Ilmu Akuntansi*, 8(2), 104–123. <https://doi.org/10.18202/tema.v8i2.177>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (2018).
- Sadat. Anwar. (2022). *Tata Kelola Keuangan Pemerintah* . Deepublish.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2022).
- Yulsiati, H., & Maqruf, R. (2022). Determinan Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 7(2), 134–145. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>